



"Tema: 8 (pengabdian kepada masyarakat)"

"Pendampingan Partisipasi Perempuan Sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam Formulasi Kebijakan Zona Khusus Pada Jalur Sanggi – Bengkunt"

Oleh

"Rahayu Sulistiowati, Meiliyana, Dewie Brima Atika, Selvi Diana Melinda"

"FISIP Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro, No. 1, Gedongmeneng, Bandar Lampung"

"Email : meiliyana.fisip@unila.ac.id"

ABSTRAK

Kegiatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan metode pendampingan PAR (Participatory Action Research) dalam proses formulasi kebijakan di zona khusus. Zona khusus merupakan bagian dari taman nasional yang karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Salah satu kelompok penerima dampak terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset alam adalah perempuan. rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan menjadi alasan penting kegiatan ini dilakukan. Langkah langkah pendampingan dimulai dari pemetaan awal, membangun hubungan kemanusiaan, penentuan agenda formulasi kebijakan, merumuskan masalah, menyusun strategi, pengorganisasian kader perempuan dan refleksi bersama mitra serta kader perempuan sekitar balai besar tnbs jalur Sanggi – Bengkunt.

Kata Kunci: *Partisipasi perempuan, Formulasi Kebijakan, Zona Khusus Hutan*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pembangunan harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga mengawasi hasil-hasil pembangunan, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Partisipasi merupakan fitur kunci dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan hutan dengan azas lestari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hutan yang menjadi Taman nasional yang adadi wilayah Provinsi Lampung adalah Taman Nasional Bukit barisan Selatan (TNBBS). Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di ujung wilayah selatan – barat Sumatera, dengan total luas 3.588 km², meliputi tiga propinsi yaitu Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Secara historis, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dinyatakan sebagai *Wildlife Sanctuary* pada tahun 1935, dan menjadi Taman Nasional pada tahun 1982. Tujuh puluh persen dari area taman berada di bawah administrasi Lampung Barat, Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung, sedangkan sisanya di bawah Bengkulu dan berbatasan dengan Sumatera Selatan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terbentang seluas



356.800 hektar dan termasuk dalam daerah administrasi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Beragam spesies dapat ditemukan di wilayah ini, dan beberapa merupakan spesies endemik Sumatera.

Taman nasional ini juga berjasa sebagai daerah tangkapan air dan penyimpan air bagi pemukiman dan lahan pertanian di sedikitnya 4 kabupaten di 2 provinsi tersebut. Masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan TNBBS sangat terbantu dengan keberadaan TNBBS ini salah satunya adalah masyarakat di Pekon Sukaraja dan Pekon Sedayu kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Pekon ini dihuni oleh masyarakat pendatang (Jawa, Sunda, Semendo) dan masyarakat asli Lampung Tanggamus. Komunitas masyarakat ini bermukim di desa yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan taman nasional. Pekon ini berjarak lebih kurang 2 jam dari ibukota Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Dengan melalui jalan utama lintas barat Sumatera dan disambung jalan tanah di dalam Kawasan taman nasional. Dua pekon ini termasuk Zona khusus TNBBS. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya sejak sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Peruntukkan Zona khusus adalah untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional.

Masyarakat di sekitar kawasan merupakan potensi penting sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian TNBBS. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat mungkin untuk dikembangkan mengingat mereka adalah yang akan merasakan dampak positif dengan terjaganya kelestarian kawasan TNBBS yang berada di sekitar mereka. Salah satu kelompok penerima dampak terbesar dari keberadaan hutan, adalah perempuan. Perempuan dan perbedaan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan. Perempuan memainkan peran berbeda dari laki-laki dalam banyak hal, misal: dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan untuk mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik. Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Hal tersebut membuat kaum perempuan mempunyai pengalaman yang luas dan membuat mereka menjadi sumber pengetahuan dan keahlian dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Konstruksi sosial tentang perempuan bahwa perempuan adalah individu yang memiliki komitmen, keberanian, ketahanan dan kesabaran tinggi, dapat menjadi modal sosial yang potensial bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan lingkungan hutan di kawasan taman nasional.

Saat ini kita ketahui bahwa ancaman kerusakan hutan dalam kawasan taman nasional semakin serius. Dikutip dari website Lembaga Kajian Advokasi dan Edukasi (<http://liveindonesia.id> yang diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 19:30 WIB), ketua komunitas perempuan penyelamat situs warisan dunia, Eva Juniar Andika mengatakan berdasarkan riset yang pernah dilakukan pada tahun 2014, mengungkap bahwa laju perambahan kawasan situs warisan dunia (taman nasional) bisa



mencapai 7,5 hektare per hari. Tentu saja kondisi kerentanan kawasan ini cukup memprihatinkan. Sehingga hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kerusakan hutan akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Perempuan adalah korban yang akan menerima dampak paling buruk akibat kerusakan lingkungan ini. Hal ini disebabkan karena peran-peran sosial perempuan yang membutuhkan kelestarian hutan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan air untuk keperluan domestik rumah tangga. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam upaya melestarikan kawasan hutan, penting untuk dilakukan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak lepas dari paradigma pola-pola pembangunan pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Indonesia yang kemudian direplikasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada (Musawa, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 236-259). Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas sumber daya alam (SDA) dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya. Sementara di desa, perempuan menghadapi tekanan ganda dalam reaksi persoalan di atas. Pertama, menghadapi tekanan dari pihak luar yang sebagian besar telah mengambil alih SDA yang merupakan sistem penghidupan mereka. Kedua, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga dihadapkan dengan ketidakadilan internal yang sudah tercipta sebelum para pihak luar (privat dan pemerintah) datang menguasai SDA mereka. Situasi yang tidak adil ini direspon oleh kaum perempuan dengan bekerja dan bekerja. Ada tidak adanya uang, perempuan harus memastikan keberlangsungan pangan keluarga. Situasi ini membuat sebagian besar perempuan yang hidup di dalam dan sekitar SDA tidak memikirkan kondisi kesehatan mereka sendiri. Sementara itu generasi muda perempuan melakukan hal yang sama seperti para laki-laki. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga di kota-kota atau menjadi buruh migran ke luar negeri. Namun, upaya yang dilakukan kaum perempuan belum dinilai sebagai bagian dari kontribusi yang strategis untuk dihargai dalam banyak aspek, seperti aspek kebijakan dalam PSDA di Indonesia. Perempuan masih dianggap kurang atau bahkan tidak berkontribusi dalam proses pembangunan. Pekerjaan domestik perempuan tidak pernah dianggap sebagai jasa yang bernilai. Keadaan ini berjalan tanpa protes karena dianggap sebagai kewajiban bahkan sebagai kodrat. Sebagai contoh, masalah perusakan hutan seringkali dikaitkan dengan perempuan dari kampung-kampung sekitar yang memotong pohon untuk dijadikan kayu bakar tanpa melalui telaahan yang komprehensif. Namun demikian, apabila dilakukan konsultasi langsung dengan perempuan, ditemukan bahwa perempuan pada umumnya hanya mengumpulkan ranting pohon dan laki-laki yang lebih banyak melakukan penebangan. Budaya masyarakat merupakan salah satu hal yang membatasi partisipasi perempuan dalam menyampaikan keperluan dan aspirasi mereka di pertemuan desa, khususnya masalah



lingkungan yang biasanya dianggap sebagai urusan dan dominasi laki-laki. Apabila perempuan berpartisipasi pada pertemuan, laki-laki tidak mendengarkan keluhan, rekomendasi dan apa yang dibicarakan perempuan. Perempuan dianggap hanya berurusan dengan kegiatan domestik tertentu yang tidak mendapatkan gaji atau tidak dianggap sebagai pekerjaan penting. Tempat mereka dalam organisasi desa tidak dianggap penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan terkait pelestarian lingkungan hidup. (Arifin Arief. 1994. Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 14).

Hal ini juga menjadi masalah yang terjadi di Pekon Sukaraja dan pekan Sedayu Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Keterlibatan masyarakat desa di kawasan sekitar TNBBS i dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaansumber daya ekonomi masih sangat terbatas (observasi tim TNBBS 2018). Hal ini tidak menguntungkan bagi eksistensi dan kualitas penduduk perempuan yang jumlahnya cukup banyak.

Permasalahan Mitra

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Ada beberapa kondisi situasi yang dialami oleh mitra yaitu:

1. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan
2. Kurangnya akses perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS
3. Rendahnya kapasitas dan produktifitas perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam di kawasan TNBBS
4. Kurangnya kemampuan perempuan menangkap peluang ekonomi dari pemanfaatan hutan di kawasan TNBBS.
5. Buruknya infra struktur akses menuju desa desa disekita kawasan TNBBS khususnya desa Sanggi Kecamatan Bandar Semuoh Kabupaten Tanggamus
6. Balai Besar TNBBS belum memiliki metode yang tepat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan di kawasan TNBBS

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

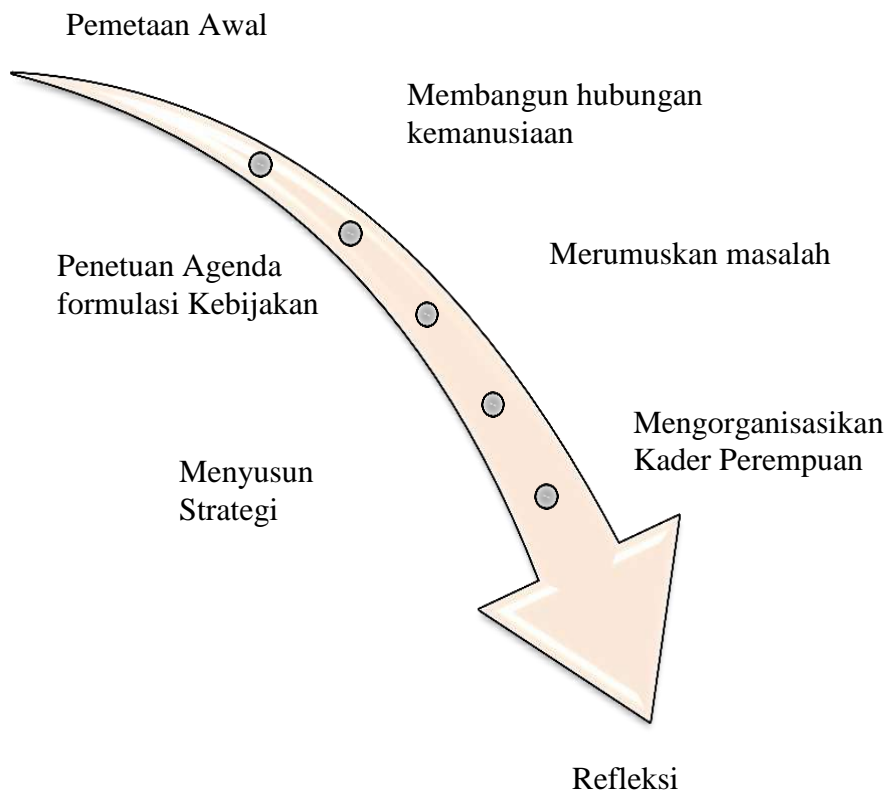
1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan
2. Meningkatkan akses perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS
3. Meningkatkan kapasitas dan produktifitas perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam di kawasan TNBBS



4. Meningkatkan kemampuan perempuan menangkap peluang ekonomi dari pemanfaatan hutan
5. Mendorong masyarakat berpikir kreatif dalam menyikapi buruknya infra struktur akses menuju desa desa di sekitar kawasan TNBBS khususnya desa Sanggi Kecamatan Bandar Semuoh Kabupaten Tanggamus
5. Mendorong Balai Besar TNBBS untuk menyusun metode yang tepat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan di kawasan TNBBS

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) Pada dasarnya, PAR merupakan pendekatan yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak stakeholders dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan landasan utamanya merupakan gagasan dari rakyat. PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Adapun tahapan dari metode ini akan dituankan dalam kegiatan sebagai berikut:



Sumber : diolah tim 2019



Berdasarkan gambar tersebut, tahapan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemetaan Awal Pemetaan awal digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah komunitas, sehingga tim pengabdian pada masyarakat akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan cara demikian akan memudahkan untuk masuk ke dalam komunitas baik melalui kunci masyarakat maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun. Tim pengabdian akan melakukan pemetaan secara umum, menentukan informan, dengan demikian tim pengabdian akan mengetahui keadaan umum jalur Sanggi - Bengkuntat.
2. Membangun Hubungan Kemanusiaan. Melakukan sebuah inkulturasi dan membangun kepercayaan (Trust building) dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Tim, mitra dan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama (Partisipatif).
3. Penentuan Agenda Formulasi Kebijakan. Penentuan agenda merumuskan kebijakan zona khusus di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
4. Merumuskan Masalah Kaum perempuan di lokasi kegiatan merumuskan masalah yang mendasar dalam hidup kemanusiaan yang dialaminya. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan pangan, papan, sandang, MCK, dan akses.
5. Menyusun Strategi Kaum perempuan menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang dirumuskan. Menentukan langkah sistematis, menentukan pihak yang terlibat (stakeholder), dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program dan kesulitan dalam melaksanakan program.
6. Pengorganisasian Kader Perempuan Kaum perempuan didampingi tim pengabdian dan mitra membangun kelompok kerja, maupun lembaga lembaga masyarakat yang bergerak dalam memecahkan problem sosial.
7. Refleksi Tim pengabdian, mitra bersama dengan kader perempuan merumuskan langkah perubahan yang partisipatif. Berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program aksi yang sudah terlaksana, tim dan mitra merefleksikan semua proses dan hasil yang diperoleh. (dari awal sampai akhir).

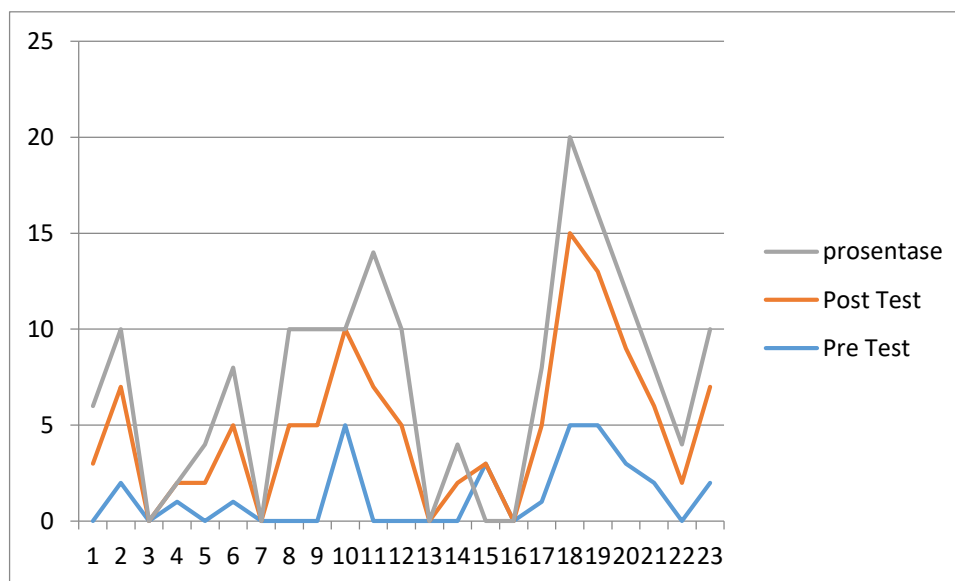
HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan

Keterlibatan perempuan dimaknai sebagai partisipasi yang kesemuanya menekankan tentang hak yang dimiliki perempuan untuk dapat terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya (Bayoa, 2013) . Artinya bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan.



Pengelolaan hutan menurut data dari berbagai penelitian masih rendahnya partisipasi masyarakat, seperti dalam (Tanjung, Sadono, & Wibowo, 2017) yang menyebutkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan di TNBBS adalah adanya zona khusus jalur sanggi bengkunt. Menurut (Sawitri & Adalina, 2016) persepsi masyarakat yang berada di zona khusus mengindikasikan bahwa mereka masih menginginkan menetap di kawasan. Zona khusus seharusnya merupakan hasil kesepakatan antar pihak yang dikelola secara kolaboratif sebagai satu kesatuan dengan taman nasional (CIFOR & PILI, 2010). Berdasarkan hasil evaluasi tim pengabdian, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan zona khusus jalur sanggi bengkunt hanya 2,3%, berikut ini data hasil evaluasi yang meng gambarkannya



Gambar 1. Hasil evaluasi

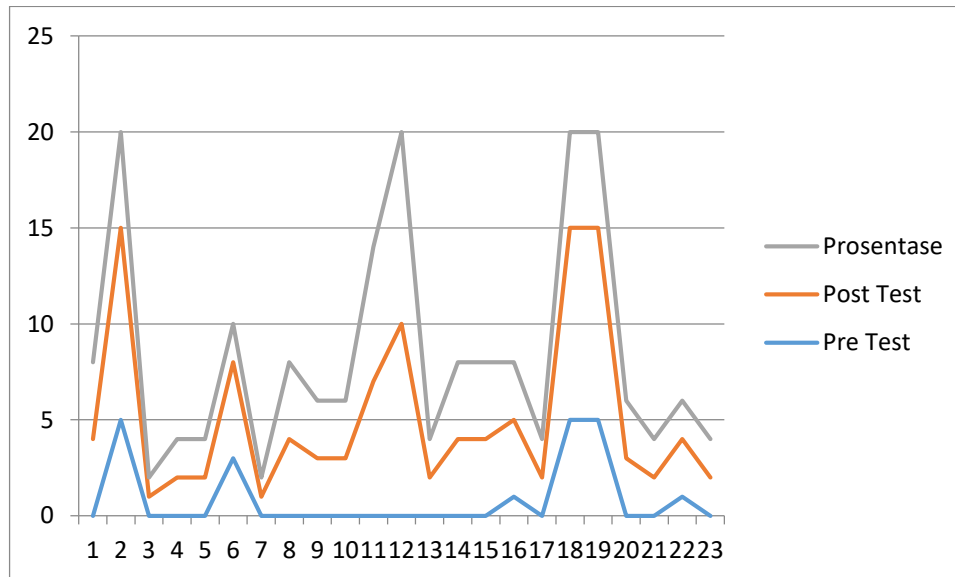
Data tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di zona khusus jalur sanggi bengkunt masih sangat rendah. Untuk itu perlu upaya dari pengelola TNBBS untuk meningkatkan keterlibatan mereka.

Akses perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS

Peningkatan akses perempuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di kawasan menjadi hal penting mengingat bahwa perempuan tidak hanya menjadi pengguna hasil pembangunan, namun juga ikut berperan melaksanakan dan berpartisipasi di segenap aspek pembangunan bangsa. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan perempuan dengan cara pemberdayaan, yang mengandung arti meningkatkan kualitas dan peran perempuan disegala bidang pembangunan. Perempuan memiliki peran-peran yang strategis dalam mendorong pembangunan yakni sebagai pelaku ekonomi (Suarmini, Zahrok, & Yoga Agustin, 2018). Nilai manfaat ekonomi yang diperoleh



dapat dijadikan acuan sebagai nilai pembanding dengan kegiatan pemanfaatan zona hutan lainnya (Kalitouw, Darusman, & Kusmana, 2015). Pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS dapat dilihat dari data berikut ini :

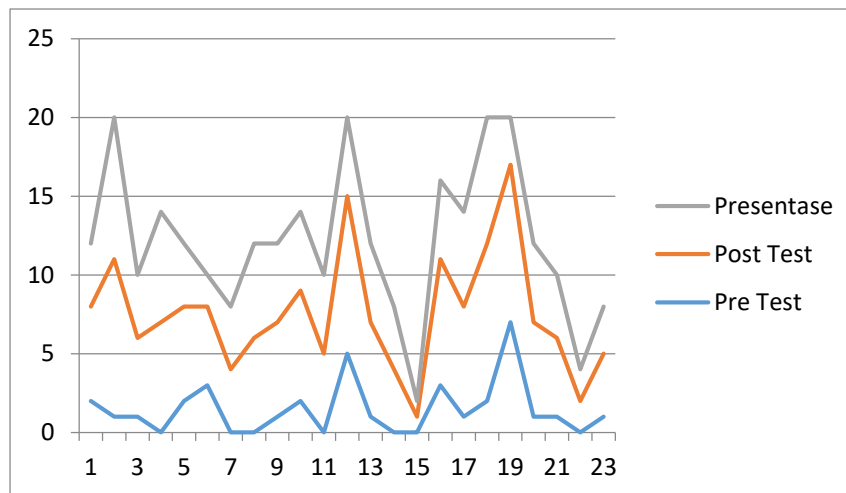


Gambar 2. Pengelolaan sumberdaya ekonomi

Berdasarkan gambar tersebut, awalnya perempuan yang tinggal di zona khusus jalur sanggi bengkuntat tidak memahami bahwa mereka memiliki akses untuk mengelola sumber daya ekonomi, namun, setelah kegiatan pengabdian, kaum perempuan menyadari akan hal tersebut, sehingga ada kenaikan sebesar 3,3% terkait peningkatan akses perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS.

Kapasitas dan produktifitas perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam di kawasan TNBBS

Dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan partisipasi sumber daya yang ada untuk memaksimalkannya. Baik laki-laki maupun perempuan, sebagai sumber daya yang ada di kawasan TNBBS, pada hakikatnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan. Akan tetapi, pada kenyataannya, sering kita jumpai tidak samanya kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Di samping perempuan dan laki-laki yang pada hakikatnya memiliki kesempatan yang sama, perempuan pun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas dirinya (Putri1, Darwis, & Taftazani, 2017). Berdasarkan hasil evaluasi terkait hal ini, berikut data yang dapat disajikan:

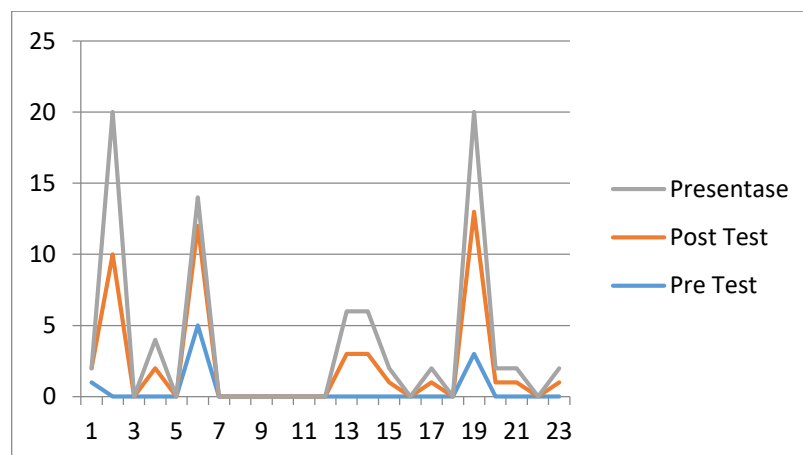


Gambar 3. Hasil evaluasi Kapasitas dan produktifitas perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam

Hasil evaluasi tersebut menggambarkan kenaikan produktivitas dan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya kawasan TNBBS sebesar 4,6%. Hal ini menjadi baik sebagai modal utama yang berkelanjutan bagi perempuan dalam mengelola sumberdaya alam di zona khusus jalur sanggi bengkunt.

Kemampuan Perempuan Menangkap Peluang Ekonomi Dari Pemanfaatan Hutan

Ketersediaan lahan yang luas dan potensi pasar yang terbuka lebar belum menjamin kemampuan perempuan sesuai harapan (Rochmayanto & Supriadi, 2012). Motif ekonomi sungguh mempengaruhi kesediaan peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan di zona khusus jalur sanggi bengkunt. Berikut adalah hasil evaluasi mengenai kemampuan perempuan menangkap peluang ekonomi dari pemanfaatan hutan di TNBBS



Gambar 3. Hasil evaluasi mengenai kemampuan perempuan menangkap peluang ekonomi dari pemanfaatan hutan

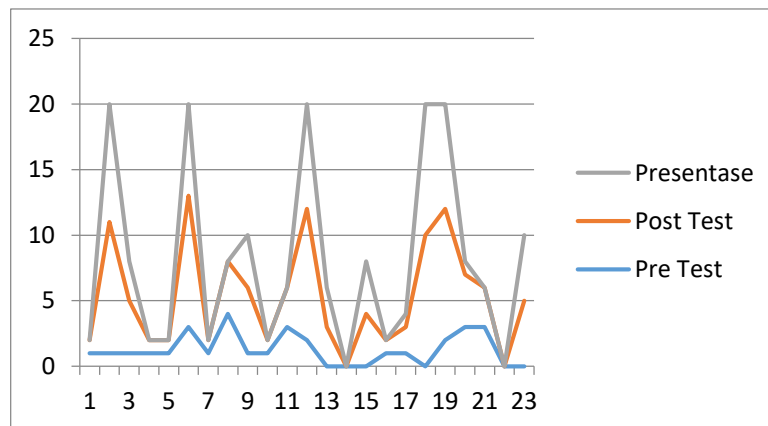
Berdasarkan data tersebut, setelah melalui berbagai agenda dan aktivitas kegiatan pengabdian, perlu diakui bahwa, kemampuan perempuan tidak mengalami perubahan secara signifikan, tercatat hanya



mengalami kenaikan 1,4% dari baseline data sebelumnya yang 0,3% perempuan memahami dan memiliki kemampuan dalam menangkap peluang ekonomi tersebut.

Mendorong masyarakat berpikir kreatif

Berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang atau dengan kata lain suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya (Maxwell, 2004). Dalam konteks ini, mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dalam menyikapi buruknya infrastruktur akses menuju desa desa di sekitar kawasan TNBBS khususnya desa Sanggi Kecamatan Bandar Semuoh Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data evaluasi, kemampuan ini ditunjukkan oleh data berikut ini



Gambar 4. Hasil evaluasi mendorong masyarakat berpikir kreatif

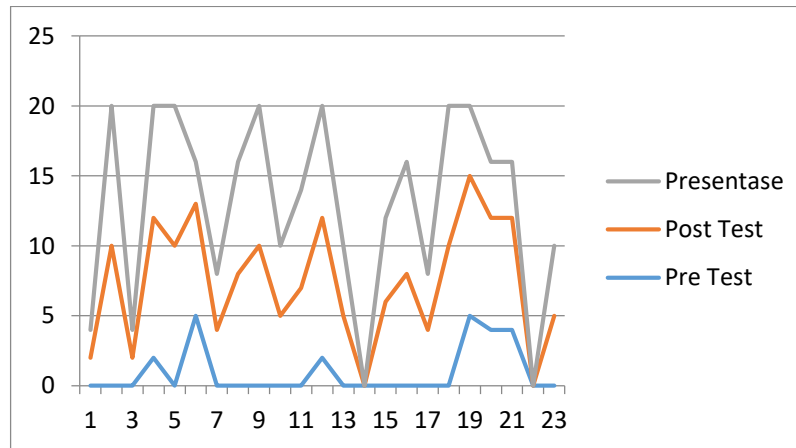
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan ada perubahan dalam menjadikan masyarakat yang berada di zona khusus sanggi bengkunat menyadari tentang kreatifitas mereka dalam menyikapi keterbatasan akses infrastruktur di kawasan hutan. Perubahan tersebut ditunjukkan di angka 2,7%. Angka ini setidaknya mampu mendorong masyarakat untuk berdaya ditengah keterbatasan yang ada.

Mendorong Balai Besar Tnbbs Untuk Menyusun Metode Partisipasi Perempuan

Secara kelembagaan, Balai Besar TNBBS didorong agar mampu meningkatkan partisipasi perempuan di zona khusus, mengingat permasalahan terbesar dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) salah satunya adalah partisipasi perempuan. Sementara itu, berbagai aspek terkait kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta pengaruhnya terhadap perilaku konservasi mereka tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaannya. Pemberdayaan bukan sekedar untuk menghentikan kerusakan kawasan, tetapi harus memperhatikan upaya pelestarian kawasan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pemberdayaan juga



diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan. Berikut ini adalah hasil evaluasi tim pengabdian mengenai metode partisipasi:



Gambar 5. Hasil evaluasi tim pengabdian mengenai metode partisipasi

Data tersebut menunjukkan ada 5,5% kenaikan pengetahuan dan aktivitas kaum perempuan terhadap hal ini, bahwa Balai Besar TNBBS perlu didorong untuk menyusun metode pelibatan kaum perempuan. Ada upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar TNBBS, sehingga kaum perempuan di sekitar kawasan zona khusus memahami hal ini, berdasarkan data, salah satu model yang telah disusun dan dilakukan oleh Balai besar TNBBS adalah Model Desa Konservasi (MDK) merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dan konservasi yang dilaksanakan TNBBS. Memahami proses dan dampaknya terhadap masyarakat merupakan langkah dasar dan strategis dalam upaya konservasi TNBBS (Ristianasari, Muljono, & S. Gani, 2013).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan zona khusus jalur sanggi bengkunt hanya 2,3%. Data tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di zona khusus ini bengkunt masih sangat rendah. Untuk itu perlu upaya dari pengelola TNBBS untuk meningkatkan keterlibatan merek
2. Pada awal pertemuan perempuan yang tinggal di zona khusus jalur sanggi bengkunt tidak memahami bahwa mereka memiliki akses untuk mengelola sumber daya ekonomi, namun, setelah kegiatan pengabdian, kaum perempuan menyadari akan hal tersebut, sehingga ada kenaikan sebesar 3,3% terkait peningkatan akses perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di kawasan TNBBS.
3. Hasil evaluasi setelah kegiatan pengabdian menggambarkan kenaikan produktivitas dan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya kawasan TNBBS sebesar 4,6%. Hal ini



dapat menjadi modal utama yang berkelanjutan bagi perempuan dalam mengelola sumberdaya alam di zona khusus jalur sanggi bengkuntat.

4. Hasil evaluasi di akhir kegiatan ternyata kemampuan perempuan dalam memahami dan menggunakan peluang ekonomi di kawasan taman nasional belum mengalami perubahan secara signifikan, tercatat hanya mengalami kenaikan 1,4% dari baseline data sebelumnya yang 0,3%
5. Hasil evaluasi t menunjukkan ada perubahan dalam masyarakat tentang kreatifitas mereka dalam menyikapi keterbatasan akses infrastruktur di kawasan hutan. Perubahan tersebut ditunjukkan di angka 2,7%. Angka ini setidaknya mampu mendorong masyarakat untuk berdaya ditengah keterbatasan yang ada.
6. Di akhir kegiatan pengetahuan kaum perempuan tentang keberadaan balai besar TNBBS sebagai wadah yang dapat membantu mereka terlibat dalam pengelolaan hutan kawasan TNBBS, menunjukkan peningkatan sebesar 5,5% . hal ini disebabkan karena telah ada upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar TNBBS, sehingga kaum perempuan di sekitar kawasan zona khusus memahami hal ini, berdasarkan data, salah satu model yang telah disusun dan dilakukan oleh Balai besar TNBBS adalah Model Desa Konservasi (MDK).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami haturkan kepada :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas atas kesempatan, arahan dan dukungan dana yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat kami laksanakan.
2. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Konservasi TNBBS dan seluruh jajarannya
4. Masyarakat Pekon Sukaraja dan Pekon Sedayu dan semua pihak yang terlibat sebagai *supporting team* dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayoa, G. A. 2013. Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera. Governance.
- CIFOR, & PILI. 2010. Kebijakan Pengelolaan Zona Khusus. *CIFOR*.
- Kalitouw, D. W., Darusman, D., & Kusmana, C. 2015. Potensi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove Di Desa Kulu, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i1.10363>
- PUTRI1, C. I., DARWIS, R. S., & TAFTAZANI, B. M. 2017. Peran Perempuan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada*



Masyarakat. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14269>

- Ristianasari, R., Muljono, P., & S. Gani, D. 2013. Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.3.173-185>
- Rochmayanto, Y., & Supriadi, R. 2012. Skala Ekonomis Usaha Hutan Rakyat Kayu Pulp Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. <https://doi.org/10.20886/jsek.2012.9.2.87-95>
- Sawitri, R., & Adalina, Y. 2016. Kajian Usulan Zona Khusus Taman Nasional Kutai. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*. <https://doi.org/10.20886/jphka.2016.13.2.85-100>
- Suarmini, N. W., Zahrok, S., & Yoga Agustin, D. S. 2018. Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0. *IPTEK Journal of Proceedings Series*. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4420>
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.12990>

<http://digilib.uinsby.ac.id/10000/4/bab%202.pdf> diakses tanggal 1 November 2019